



## Bukan untuk Liburan, Wajib Buat Laporan Bulanan

**SEBAGIAN** pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dipastikan menerapkan pola kerja WFH mulai Jumat pekan ini. Upaya pengawasan wajib dilakukan oleh masing-masing kepala dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja Sarwanto mengatakan, pengawasan terhadap pegawai yang menjalankan WFH diwujudkan dengan pemantauan oleh kepala OPD secara harian. Hal ini untuk mengantisipasi tindakan pelanggaran, seperti menggunakan hari WFH untuk liburan.

Dia menegaskan, tiap kepala OPD di lingkungan Pemkot Jogja juga wajib membuat laporan bulanan yang berisi hasil pemantauan kinerja pegawai selama WFH. Laporan tersebut diserahkan kepada wali kota melalui BKPSDM dengan tembusan inspektorat daerah.

"Laporan diserahkan setiap akhir bulan," ujar Sarwanto saat dikonfirmasi, kemarin (5/4).

Mantan Camat Wirobrajan itu membeberkan, jika ada pegawai yang menyimpang dari kebijakan WFH maka kepala OPD wajib memberikan sanksi. Serta melakukan pembinaan kepada pegawai bersalah

agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sementara bagi pegawai sektor pelayanan publik atau yang tidak menjalankan WFH maka bekerja seperti hari biasa. Adapun kategorinya meliputi pegawai kelurahan, puskesmas, kemantren, kepengudukan, mal pelayanan publik, satpol pp, kebakaran, dinas perhubungan, dan pendidikan.

"Pegawai eselon dua dan tiga, lalu camat dan lurah juga tidak melaksanakan WFH," imbuhnya.

Terpisah, Aktivitas Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengingatkan implementasi WFH di Pemkot Jogja harus mengedepankan semangat efisiensi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai bentuk sikap menipisnya minyak dari dampak perang global.

Kamba menilai, penerapan WFH pada hari Jumat memang cukup rawan karena bertepatan dengan masa liburan akhir pekan. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan ketat. Agar pegawai tidak memanfaatkan WFH untuk berlibur atau melakukan kegiatan yang memboroskan BBM.

"Khawatirnya tujuan awal dari WFH dalam sepekan guna menghemat BBM malah tidak tercapai," sebutnya. (inu/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005